
TANTANGAN BIROKRASI DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

Oleh

Wieky Rusmanto

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Nurtanio

Email: rusmantowieky@gmail.com**Abstrak**

Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk birokrasi pemerintahan yang mana menjadi organisasi utama dalam memberikan pelayanan publik, didasarkan kepada hal tersebut artikel ini mengkaji mengenai bagaimana birokrasi menjalankan fungsinya di masa pandemi Covid-19 yang dilihat dari perspektif administrasi publik. Artikel ini merupakan artikel dengan jenis penelitian studi kepustakaan yang mana sumber data berasal dari sumber data sekunder seperti dari buku dan artikel jurnal. Hasil analisis menunjukkan bahwa birokrasi di masa pandemi Covid-19 menghadapi 2 (dua) tantangan utama, yaitu bagaimana secara internal memastikan sumber daya yang ada dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan secara internal bagaimana birokrasi mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang mana adanya batasan kondisi yang mengharuskan pemberian pelayanan publik didasarkan kepada protokol kesehatan Covid-19. Kondisi ini menjadi kesempatan bagi birokrasi untuk dapat menyusun berbagai cara alternatif guna memastikan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Birokrasi, Pandemi Covid-19, Pelayanan Publik.**PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi semenjak tahun 2019 sudah banyak memberi dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan baik di masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan. Di masyarakat adanya pandemi Covid-19 telah memberi dampak kepada menurunnya kesehatan masyarakat yang secara otomatis menurunkan tingkat produktifitas masyarakat. Di tingkat pemerintah maka dapat terlihat dari bagaimana birokrasi bekerja, khususnya dalam menjalankan pelayanan publik yang tidak lagi seluruhnya dilaksanakan secara langsung yang mana masyarakat akan mendatangi unit institusi layanan publik, tetapi dilaksanakan secara daring yang mana masyarakat mengakses portal layanan publik yang sudah disediakan oleh unit institusi penyedia layanan publik [1].

Pelayanan publik yang diberikan di masa sebelum adanya Pandemi Covid-19 tentu saja

secara langsung telah memberikan perbedaan dengan yang sebelumnya diberikan oleh unit institusi penyedia layanan publik. Kondisi ini dikarenakan selain untuk menurunkan potensi penyebaran Covid-19 di masa pandemi Covid-19 di tempat layanan publik, juga guna memastikan bahwa layanan yang diberikan didasarkan kepada protokol kesehatan Covid-19.

Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, maka sesungguhnya birokrasi menghadapi berbagai tantangan di masa pandemi Covid-19 ini yang mana birokrasi secara langsung tidak bisa melaksanakan fungsinya sama seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 dikarenakan adanya batasan-batasan dalam masa pemberlakuan kebijakan penanggulangan kebijakan pandemi Covid-19 yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah.

Tantangan yang dihadapi oleh birokrasi di masa pandemi Covid-19 setidaknya berdasarkan kepada temuan awal terdiri dari 3 (tiga) hal utama, yaitu:

Pertama, bagaimana sumber daya aparatur yang ada di dalam birokrasi menghadapi pandemi Covid-19 yang dihadapkan kepada tugas dan fungsi yang diberikan, mengingat pemberian pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 berbeda dengan sebelum masa pandemi Covid-19, sehingga apakah aparatur pemerintah sebagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dapat mengikuti perubahan tersebut atau sebaliknya.

Kedua, bagaimana sistem kerja dapat berfungsi dalam lingkungan organisasi yang ada di masa pandemi Covid-19. Hal ini menyangkut bagaimana Pandemi Covid-19 berdampak kepada lingkungan kerja birokrasi, semisal bagaimana sistem pembagian kerja antara *Work From Home* (WFH) dengan *Work From Office* dapat berjalan dengan optimal, hal ini menyangkut mengenai komunikasi dan koordinasi diantara berbagai unit yang ada dalam birokrasi dalam menjalankan fungsinya, sehingga dapat optimal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Ketiga, bagaimana birokrasi menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang mana hal ini didasarkan kepada adanya pemberlakuan kebijakan penanggulangan Covid-19 yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah seperti kebijakan PPKM yang di beberapa kota dilaksanakan secara ketat yang mana berbagai kantor pemerintahan ditutup guna menurunkan angka paparan Covid-19, sehingga kondisi ini memberikan tantangan kepada birokrasi untuk memberikan pelayanan publik secara tidak langsung atau berbasis daring yang mana tidak sepenuhnya masyarakat dapat mengakses layanan publik yang berbasis kepada pemanfaatan teknologi tersebut [2].

Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka artikel ini akan mengkaji mengenai

tantangan birokrasi di masa pandemi Covid-19 yang akan dilihat dari perspektif administrasi publik, khususnya bagaimana birokrasi menjalankan tugasnya dalam menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga diharapkan akhir dari analisis dalam artikel ini akan diketemukan berbagai tantangan birokrasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan guna menyusun kebijakan mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi di masa pandemi Covid-19 ini, sehingga fungsi birokrasi dapat berjalan dengan baik, meskipun adanya batasan-batasan protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19.

LANDASAN TEORI

Birokrasi berdasarkan kepada terminologinya dalam bahasa Inggris sebagai kata *bureaucracy*, kata ini berasal dari kata *bureau* (berarti meja) dan *cratin* (berarti kekuasaan), artinya kekuasaan berada pada orang-orang atau aparatur yang ada di belakang meja [3]. Birokrasi sendiri dapat digunakan tidak hanya untuk menunjukkan organisasi pemerintahan semata, tetapi juga dapat menunjukkan organisasi pada umumnya yang memiliki susunan terorganisasi dan tujuan yang jelas [4].

Birokrasi diterjemahkan berbeda-beda menurut para ahli meskipun memiliki kesamaan arti secara umum, paraahli yang mengungkapkan pemahaman mengenai birokrasi antar lain yaitu:

Pertama, Bintoro Tjokroamidjojo yang mengungkapkan bahwa birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur mengenai suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang dalam suatu organisasi [5].

Kedua, Blau dan Page (1956) mengemukakan birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai berbagai tugas administratif yang besar dengan cara mengoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang. Sehingga, menurut Blau dan Page, birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-

prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadang dalam pelaksanaannya birokratisasi sering mengakibatkan adanya ketidakefisienan [5].

Ketiga, Ismani (2001) mengemukakan bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dan dengan efisiensi yang setinggi-tingginya. Dari pandangan demikian, tidak sedikit pun alasan untuk menganggap birokrasi itu jelek dan tidak efisien [5].

Keempat, Dwijowijoto (2004) menjelaskan bahwa birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik dan buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Selanjutnya, dikemukakan bahwa di dalam masyarakat modern, yang terdapat begitu banyak urusan yang terus-menerus dan ajeg, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya. Birokrasi dalam praktik dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil [5].

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa birokrasi merupakan merupakan suatu kesatuan organisasi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan suatu tugas yang telah diberikan yang mana diorientasikan untuk menjalankan kewenangan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka. Hal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana birokrasi dalam menjalankan fungsinya yang berupa uraian deskripsi [6]. Jenis penelitian studi pustaka dimaksudkan bahwa artikel ini menganalisis berbagai dokumen sekunder seperti dari buku dan artikel jurnal. Analisis data dilakukan melalui proses triangulasi data yang mana data dikumpulkan dari berbagai sumber yang kemudian diolah dan

dianalisis guna mendapatkan keabsahan data yang sesuai dengan kondisi nyata yang sesungguhnya atau keadaan sebenarnya. Dengan begitu data yang disajikan akan bersifat ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 di Indonesia

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi di Indonesia dimulai dari awal tahun 2020 sampai dengan saat ini telah berlangsung selama 2 tahun masih belum menunjukkan adanya kondisi Indonesia bebas dari penyebaran Covid-19, berbagai kasus paparan Covid-19 terus terjadi di berbagai daerah yang ada yang mana data sampai dengan saat ini setidaknya Covid-19 telah menginfeksi 4,2 juta penduduk dan jumlah korban yang disebabkan Covid-19 telah berjumlah sebanyak 143.936 orang meninggal dunia [7].

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun tersebut direspons oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan penanggulangan yang pada dasarnya untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yang diharapkan mampu meminimalisir akibat negatif dari adanya pandemi Covid-19 tersebut [8].

Setidaknya terdapat kebijakan utama dalam penanggulangan Covid-19 yang telah dibuat oleh pemerintah mulai dari sampai dengan. Adapun uraian kebijakan yang diterapkan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Kebijakan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB merupakan kebijakan pertama yang dibuat pemerintah dalam rangka menanggulangi Covid-19, kebijakan ini pada dasarnya ditujukan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 yang pada saat itu intensitasnya masih rendah dan baru ditemukan di beberapa provinsi saja, sehingga provinsi yang tengah terdapat Covid-19 menerapkan kebijakan ini, sedangkan provinsi lainnya menerapkan pembatasan sosial yang

disesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing [9].

Kedua, Kebijakan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) Lanjutan yang dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2020 yang mana kebijakan ini sebagai respons pemerintah yang mana penyebaran Covid-19 sudah mulai menyebar dengan intensitas tinggi ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia dengan kasus paparan warga masyarakat yang terus meningkat, kebijakan ini pada dasarnya ditujukan untuk membendung penyebaran Covid-19 lebih meluas ke berbagai daerah lainnya.

Ketiga, Kebijakan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) Ketat yang mana dasar pemberlakuan kebijakan ini yaitu semakin masifnya penyebaran Covid-19 di berbagai daerah yang ada di Indonesia sehingga perlu untuk menanggulangi Covid-19 secara terpadu dan menyeluruh, kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan angka terinfeksi Covid-19 yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, dengan begitu diharapkan mampu membendung dampak negatif lebih lanjut yang mungkin muncul diakibatkan adanya pandemi ini.

Keempat, Kebijakan PSBB Transisi yang mana kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka menanggulangi Covid-19 di tengah-tengah masyarakat yang kasus penyebaran Covid-19 mulai mengalami penurunan, sehingga kebijakan ini dilakukan setelah adanya puncak penyebaran Covid-19 di Indonesia, kebijakan ini ditujukan untuk memastikan bahwa penyebaran Covid-19 terkendali dan masyarakat dapat hidup kembali dalam keadaan normal baru didasarkan kepada protokol kesehatan Covid-19.

Kelima, Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kebijakan ini pada dasarnya sama dengan kebijakan PSBB namun dengan pendekatan yang berbeda yang mana perbedaannya yaitu kebijakan PPKM akan disesuaikan dengan tingkatannya yang akan ditentukan sesuai

dengan kondisi di suatu daerah dalam periode 2 minggu sekali, sehingga kebijakan ini akan berubah sesuai dengan kondisi saat ini, seperti pada level 2, 3 dan 4 sesuai dengan yang ada di daerah yang bersangkutan.

Kelima kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19 pada akhirnya ditujukan guna membendung penyebaran Covid-19 yang sudah menyebar ke berbagai provinsi dan juga untuk mengurangi dampak Covid-19 bagi kehidupan masyarakat, seperti dapat membenteng peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga pandemi Covid-19 tidak akan memberi banyak dampak negatif bagi berbagai kehidupan baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan.

Birokrasi di Masa Pandemi Covid-19

Birokrasi merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan sebagai organisasi yang mengatur tatanan sosial dan kehidupan masyarakat. Birokrasi sebagai pemegang kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan memiliki fungsi untuk menjalankan kebijakan baik dalam konteks tata pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Ketiga peran tersebut harus dijalankan oleh birokrasi dalam berbagai kondisi yang ada, hal ini dikarenakan ketidakberfungsian birokrasi akan menyebabkan tidak berjalannya kehidupan masyarakat yang teratur.

Penyelenggaraan birokrasi dikaitkan dengan pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia maka setidaknya ketiga fungsi yang ada harus juga dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Dalam prakteknya ketiga fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pemerintahan merupakan bagian penting dari birokrasi yang mana birokrasi merupakan wujud pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Dikaitkan dengan

pandemi Covid-19, maka fungsi pemerintah di satu sisi harus dioptimalkan seperti upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 yang harus dilakukan. Hal ini menempatkan birokrasi sebagai organ pemerintah yang bergerak melaksanakan kebijakan penanggulangan Covid-19. Di sisi lain fungsi pemerintah tidak dapat sepenuhnya berjalan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 secara langsung berimplikasi kepada proses penyelenggaraan pemerintahan. Didasarkan kepada pemahaman tersebut, maka birokrasi di masa pandemi Covid-19 harus memainkan peran penting sebagai alat pemerintah dalam upayanya menanggulangi Covid-19.

Kedua, penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan di masa pandemi Covid-19 mengalami perubahan yang mana pembangunan secara fisik mengalami penurunan, sedangkan pembangunan di bidang kesehatan mengalami kenaikan seperti adanya alokasi pemerintah untuk membangun fasilitas kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Perubahan pembangunan ini menuntut birokrasi untuk dapat melaksanakan program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah, sehingga berbagai upaya pembangunan, khususnya yang ditunjukkan guna menanggulangi Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga, penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 mengalami berbagai hambatan, seperti adanya kebijakan PSBB yang secara langsung menghentikan pelayanan publik secara langsung dan dialihkan kepada pelayanan publik secara daring, hal ini mendorong birokrasi untuk senantiasa menyusun strategi agar dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik sekalipun harus dilaksanakan secara daring [10].

Tantangan Birokrasi di Masa Pandemi Covid-19

Berbagai tantangan dihadapi birokrasi di masa pandemi Covid-19 yang mana tantangan tersebut harus mampu mendorong birokrasi ke arah yang lebih baik di masa pandemi Covid-19 khususnya dan di masa yang akan datang pada umumnya. Adapun berbagai tantangan yang dihadapi birokrasi di masa pandemi covid-19 antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, membangun sumber daya aparatur pemerintahan yang kompeten dan profesional. Masa pandemi Covid-19 merupakan masa yang mana aparatur pemerintah dituntut untuk merubah budaya kerja yang selama ini dilaksanakan, khususnya dikarenakan adanya pembagian kerja antara bekerja di rumah dengan bekerja di kantor, kondisi ini menuntut aparatur pemerintah untuk dapat beradaptasi, khususnya mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang mana ketika aparatur pemerintah sedang melaksanakan pekerjaannya di rumah, maka media komunikasi yang digunakan seperti gawai elektronik harus bisa dioptimalkan oleh aparatur pemerintah yang ada, sehingga membangun sumber daya manusia yang kompeten termasuk di dalamnya membangun aparatur pemerintahan yang mampu menguasai kemajuan teknologi informasi, dengan begitu adanya kapasitas aparatur pemerintah yang professional yang didalamnya mampu menunjang pekerjaannya berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi.

Kedua, memberikan pelayanan publik yang optimal di tengah keterbatasan dan kondisi yang ada. Pandemi Covid-19 telah menciptakan kondisi yang berbeda, khususnya adanya batasan berinteraksi langsung dikarenakan memiliki potensi penyebaran Covid-19. Hal ini dikaitkan dengan pelayanan publik maka berimplikasi kepada adanya keterbatasan unit penyelenggara layanan publik untuk dapat secara maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dikarenakan adanya kewajiban untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Kondisi adanya keterbatasan memberikan pelayanan publik secara langsung menjadi tantangan bagi birokrasi untuk dapat secara optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang ditempuh yaitu memberikan pelayanan secara daring yang mana adanya pemanfaatan teknologi yang memungkinkan layanan diberikan kepada masyarakat tanpa harus bertatap muka secara langsung

Tantangan dalam memberikan pelayanan publik secara langsung yaitu bagaimana birokrasi mampu secara maksimal memanfaatkan teknologi yang ada untuk dapat memberikan pelayanan publik, sehingga teknologi mampu menciptakan dampak positif kepada pelayanan yang diberikan.

Ketiga, menciptakan inovasi pelayanan di tengah pandemi Covid-19. Inovasi merupakan suatu keharusan dalam sebuah organisasi, hal ini dikarenakan birokrasi harus terus mengembangkan dirinya untuk menjadi lebih baik, didasarkan kepada permasalahan tersebut maka inovasi dijadikan sebagai upaya untuk memperbaiki birokrasi.

Inovasi dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19, maka inovasi ditujukan guna memastikan birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, sehingga berbagai permasalahan yang muncul tidak dijadikan sebagai masalah yang dapat menghalangi kinerja birokrasi, tetapi dijadikan sebagai peluang untuk memperbaiki birokrasi.

Inovasi dikaitkan dengan birokrasi di masa pandemi Covid-19 juga didasarkan kepada pemahaman bahwa adanya inovasi akan turut serta memperbaiki pelayanan publik, dengan artian bahwa inovasi yang dilahirkan oleh birokrasi akan mampu memberikan berbagai model pelayanan publik yang pada akhirnya akan memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Berdasarkan kepada penjelasan tersebut di atas, maka ketiga tantangan yang dihadapi sebagaimana dijelaskan harus dapat disikapi oleh birokrasi sebagai suatu upaya yang mampu

memperbaiki birokrasi ke arah yang lebih baik, selain daripada itu tantangan yang ada harus mampu dilalui oleh birokrasi guna memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas kepada masyarakat.

Rekomendasi Perbaikan Birokrasi di Masa Pandemi

Perbaikan terhadap birokrasi dalam menjalankan fungsinya di masa pandemi Covid-19 perlu untuk dilakukan, hal ini dikarenakan birokrasi menjadi penggerak utama dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, adapun beberapa hal yang harus dilakukan agar birokrasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal di masa pandemi Covid-19 antara lain yaitu sebagai berikut:

Pertama, melakukan optimalisasi sumber daya manusia yang profesional. Hal ini setidaknya mencakup dua hal utama yaitu peningkatan kompetensi aparatur birokrasi yang menyangkut mengenai tugas dan fungsi dari pekerjaan yang menjadi kewajibannya, sehingga adanya kompetensi ini akan mampu meningkatkan profesionalisme aparatur yang akan berdampak positif secara langsung kepada kualitas pelayanan publik yang tengah dilaksanakan atau yang diberikan kepada masyarakat.

Hal kedua yaitu tingkat adaptasi aparatur pemerintah kepada kondisi dan situasi yang ada, sehingga aparatur pemerintah dapat bekerja di setiap situasi dan kondisi yang ada. Dikaitkan dengan pandemi Covid-19 maka kondisi adanya keterbatasan pelayanan yang langsung dimana diberlakukannya protokol kesehatan Covid-19 jangan sampai menjadikan beban dan halangan bagi aparatur birokrasi untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi justru harus mampu memberikan pelayanan yang setara sebelum adanya pandemi Covid-19 atau bahkan lebih daripada sebelumnya [11].

Dua hal tersebut harus mampu dijalankan oleh aparatur pemerintah, sehingga aparatur pemerintah dapat bekerja secara professional di

berbagai situasi dan kondisi yang ada tanpa adanya pengaruh atau penurunan terhadap pelayanan publik yang diberikan ketika situasi dan kondisi yang ada dalam birokrasi mengalami perubahan.

Kedua, restrukturisasi struktur birokrasi yang mampu menjawab tantangan dalam berbagai situasi dan kondisi. Restrukturisasi struktur birokrasi sudah menjadi agenda dalam reformasi birokrasi, yang mana birokrasi harus menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan fungsinya. Berbagai upaya dalam melakukan reformasi birokrasi ditujukan untuk memastikan bahwa birokrasi dalam keadaan baik dan mampu melaksanakan tugasnya termasuk di dalamnya melaksanakan tugas pelayanan publik

Restrukturisasi birokrasi dalam konteks pandemi Covid-19 pada dasarnya ditunjukkan untuk melaksanakan fungsi yang baik di tengah adanya pembatasan sosial yang ada, hal ini dimaksudkan birokrasi mampu dapat bekerja meskipun adanya batasan sosial dalam konteks protokol kesehatan Covid-19, sehingga dengan begitu fungsi-fungsi yang kurang optimal dapat dioptimalkan dengan cara melakukan restrukturisasi birokrasi.

Ketiga, komunikasi dan koordinasi antar unit dalam birokrasi di masa pandemi Covid-19. Koordinasi dan komunikasi menjadi bagian yang penting dalam jalannya fungsi birokrasi yang mana salah satu keberhasilan pelaksanaan fungsi birokrasi yaitu terciptanya komunikasi dan koordinasi antar berbagai unsur dalam birokrasi itu sendiri.

Keempat, pemanfaatan teknologi. Teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, teknologi sudah menjadi bagian yang mampu mempermudah masyarakat dalam menjalankan kehidupannya, sehingga keberadaan teknologi sangat dibutuhkan masyarakat.

Teknologi dalam birokrasi secara empiris sudah diterapkan beberapa dekade terakhir yang mana pada awalnya penggunaan komputer dan jaringan internet ditujukan untuk

mempermudah komunikasi antar unit birokrasi dalam menjalankan tugasnya.

Seiring dengan perkembangan jaman, maka teknologi dimanfaatkan secara luas dalam birokrasi, termasuk di dalamnya digunakan untuk menyelenggarakan layanan publik di berbagai instansi pemerintahan, sehingga adanya pemanfaatan teknologi akan mempermudah unit penyelenggara layanan publik untuk memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Di masa pandemi Covid-19 yang mana adanya batasan interaksi secara tatap muka mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk lebih ditingkatkan, dikarenakan potensi pemberian layanan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19 secara langsung berpotensi untuk menyebabkan penyebaran Covid-19.

Didasarkan kepada hal ini, maka pemanfaatan teknologi oleh birokrasi harus terus dilakukan dan dikembangkan sampai dengan masyarakat memiliki kemudahan untuk mengakses layanan publik yang berbasis kepada teknologi tersebut, sehingga diharapkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara layanan publik akan memiliki kesamaan dengan layanan yang diberikan secara langsung, bahkan diharapkan layanan berbasis digital akan memiliki kualitas yang lebih baik dibanding dengan layanan yang dilaksanakan secara langsung.

Berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka berbagai upaya yang perlu dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki fungsi kinerja birokrasi yang selama ini ada, khususnya kinerja birokrasi di masa pandemi Covid-19 agar dapat lebih baik lagi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 telah banyak merubah berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya mengenai penyelenggaraan fungsi birokrasi yang mana setidaknya terdapat 2 (dua)

tantangan utama yang dihadapi oleh birokrasi di masa pandemi Covid-19, yaitu: Pertama, bagaimana secara internal memastikan sumber daya yang ada dalam birokrasi dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kedua, secara internal tantangannya yaitu bagaimana birokrasi mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang mana adanya batasan kondisi yang mengharuskan pemberian pelayanan publik didasarkan kepada protokol kesehatan Covid-19, bahkan harus dilakukan secara daring guna mendukung upaya penanggulangan Covid-19 yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Meskipun demikian, kondisi ini menjadi kesempatan bagi birokrasi untuk dapat menyusun berbagai cara alternatif guna memastikan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Saran

Pandemi Covid-19 menjadi masalah sekaligus tantangan dalam menjalankan fungsi birokrasi yang mana pelayanan publik sebagai bagian dari tugas utamanya harus tetap dilaksanakan. Didasarkan kepada hal tersebut, maka upaya pemerintah guna memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi harus direncanakan dengan baik, sehingga pelayanan publik dapat tetap diberikan kepada masyarakat dalam berbagai kondisi yang ada.

Selain daripada itu, adanya pandemi Covid-19 harus mampu mendorong peningkatan kualitas aparatur pemerintah yang ada, sehingga kinerja aparatur pemerintah dapat mendorong kinerja birokrasi ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, "Apa yang Harus Kamu Ketahui?," Jakarta, 2020.
- [2] B. Istianto, *Manajemen Pemerintahan: Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Edisi Kedu. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- [3] L. Romli, "Masalah Reformasi Birokrasi," *J. Kebijak. dan Manaj. PNS*, vol. 2, no. 2, pp. 1–8, 2008.
- [4] Firdaus, "Birokrasi dan Implementasi Program," *J. Ecomet Glob.*, vol. 3, no. 2, pp. 115–125, 2018.
- [5] Muhammad, *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance)*. Sulawesi: Unimal Press, 2018.
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- [7] Worldometer, "COVID-19 Coronavirus Pandemic," *worldometer.info*, 2020. [Online]. Available: <https://www.worldometers.info/coronavirus/>. [Accessed: 11-Apr-2020].
- [8] D. Herdiana, "Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid19: Kajian Konstruksi Penilaian," in *Manajemen Strategis pada Sektor Publik: Capacity Building dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Aparatur Menghadapi Governance Crisis Akibat Pandemi COVID-19*, 2020.
- [9] D. Herdiana, "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," *Decis. J. Adm. Publik*, vol. 2, no. 2, pp. 1–14, 2020.
- [10] Rosidah, "Patologi Birokrasi dalam Organisasi Publik dan Upaya Mecegahnya," *J. Inf.*, vol. XXX1, no. 1, pp. 63–69, 2005.
- [11] D. Supratman, "Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangkagood Governance Menuju Birokrasi Berkelas Dunia," *J. Adm. Publik*, vol. XIV, no. 2, pp. 102–108, 2018.